

## PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN DAN UPAH TERHADAP KESEMPATAN KERJA DAN KEMISKINAN DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI BALI

Nadya Oktaviani<sup>1</sup>  
Gede Wardana<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia  
e-mail: nadyaoktaviani432@gmail.com

### ABSTRAK

Kemiskinan dapat ditangani apabila tercipta kesempatan kerja yang layak dan mampu memberikan pendapatan yang dapat menjamin kehidupan para pekerja dan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan dan upah terhadap kesempatan kerja dan kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan 72 jumlah pengamatan, selanjutnya dianalisis menggunakan analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Tingkat pendidikan, upah, dan kesempatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Kesempatan kerja bukan sebagai variabel intervening tingkat pendidikan (X1) terhadap kemiskinan (Y2) di Kabupaten/Kota Provinsi Bali atau dengan kata lain tingkat pendidikan tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemiskinan melalui kesempatan kerja. Kesempatan kerja bukan sebagai variabel intervening upah (X2) terhadap kemiskinan (Y2) di Provinsi Bali atau dengan kata lain upah tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemiskinan melalui kesempatan kerja.

**Kata Kunci :** tingkat pendidikan, upah, kesempatan kerja, kemiskinan.

### ABSTRACT

*Poverty can be dealt with if employment opportunities are created that are capable of providing income that can guarantee the lives of workers and the community. The purpose of this study was to analyze influence the level of education and wages for employment opportunities and poverty in the District / City of Bali Province. The data used in this study are secondary data with 72 observations, then analyzed using path analysis. The results showed that the level of education and wages had a positive and significant effect on employment opportunities in Regencies / Cities in the Province of Bali. The level of education, wages, and employment opportunity has a negative and significant effect on poverty in Districts / Cities in the Province of Bali. Job opportunity is not an intervening variable of education level (X1) on poverty (Y2) in the Regency / City of Bali Province or in other words the level of education does not affect indirectly on poverty through employment opportunities. Job opportunity is not an intervening variable of wages (X2) to poverty (Y2) in the Province of Bali or in other words wages do not indirectly affect poverty through employment opportunities.*

**Keyword :** education level, wages, job opportunities, poverty.

## PENDAHULUAN

Pembangunan adalah sebuah proses perbaikan yang dilakukan secara terus menerus pada suatu masyarakat atau sistem sosial secara keseluruhan untuk mencapai sebuah kehidupan yang lebih baik (Todaro, 2005:125). Pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar terlepas dari hal-hal yang lain. Pendidikan adalah hal yang pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga, dan hal yang fundamental untuk membentuk kemampuan manusia yang lebih luas yang berada pada inti makna pembangunan. Tujuan pendidikan adalah menciptakan seseorang yang berkualitas dan berkarakter sehingga memiliki pandangan yang luas untuk masa depan dengan mencapai suatu cita-cita yang diharapkan. Pemerintah mempunyai peran aktif dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan agar sumber daya manusia yang dihasilkan dapat menjadi sumber untuk pembangunan Negara maupun daerah. Usaha pemerintah untuk memajukan pendidikan yaitu dengan program peningkatan mutu pendidikan, dan tenaga kependidikan berupa peningkatan kualifikasi guru ke jenjang S1 hingga S2, beasiswa perguruan tinggi, dan beasiswa pada fakultas langka peminat.

Pembangunan pendidikan yang baik dapat dilihat dari meningkatnya rata-rata lama sekolah. Tingginya rata-rata lama sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki seseorang. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah maka semakin lama atau tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan. Tabel 1.1 berikut ini menunjukkan rata-rata lama sekolah kabupaten/kota di Provinsi Bali pada tahun 2011 – 2018.

**Tabel 1.1 Rata – Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2011 – 2018 (dalam tahun)**

Kabupaten/Kota	Rata-Rata Lama Sekolah							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jembrana	7,23	7,25	7,27	7,30	7,54	7,59	7,62	7,95
Tabanan	7,68	7,76	7,83	7,91	8,07	8,10	8,43	8,64
Badung	8,96	9,07	9,18	9,29	9,44	9,90	9,99	10,06
Gianyar	7,73	7,99	8,24	8,28	8,49	8,86	8,87	8,92
Klungkung	6,68	6,81	6,88	6,90	6,98	7,06	7,46	7,75
Bangli	5,97	6,01	6,35	6,38	6,41	6,44	6,80	7,13
Karangasem	4,60	5,22	5,34	5,39	5,42	5,48	5,52	5,97
Buleleng	6,39	6,51	6,63	6,66	6,77	6,85	7,03	7,04
Denpasar	10,59	10,82	10,90	10,96	11,02	11,14	11,15	11,16
<b>Provinsi Bali</b>	<b>7,77</b>	<b>8,05</b>	<b>8,10</b>	<b>8,11</b>	<b>8,26</b>	<b>8,36</b>	<b>8,55</b>	<b>8,65</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2019.

Menurut Badan Pusat Statistik (2018), rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berusia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Pendidikan yang diukur dengan rata-rata lama sekolah berpengaruh besar terhadap menurunnya tingkat kemiskinan. Hal tersebut berarti, pembangunan melalui pendidikan dapat dikatakan sangat penting untuk menekan tingkat kemiskinan. Selain itu agar penduduk memperoleh pekerjaan yang baik harus disertai pendidikan dan keahlian yang baik.

Berdasarkan Tabel 1.1 bahwa rata-rata lama sekolah di Provinsi Bali mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 rata-rata lama sekolah di Provinsi Bali sebesar 8,65 tahun, lebih tinggi 0,48 tahun dibandingkan rata-rata lama sekolah nasional yakni 8,17 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk berusia 15 tahun keatas di Provinsi Bali telah menamatkan jenjang Sekolah Menengah Pertamanya.

Arsyad (1997) menyatakan bahwa salah satu mekanisme pokok pada Negara berkembang untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan ketidakmerataan

distribusi pendapatan adalah dengan memberikan upah yang memadai dan menyediakan kesempatan kerja bagi kelompok penduduk miskin.

Berdasarkan UU No.13 Tahun 2003, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Turunnya tingkat upah menyebabkan meningkatkan kesempatan kerja, sehingga dapat dikatakan bahwa kesempatan kerja mempunyai hubungan timbal balik dengan tingkat upah.

Para pekerja menjadi salah satu pendorong gagalnya pertumbuhan ekonomi meretas kemiskinan (Yudha, 2013). Kebijakan upah minimum adalah salah satu strategi pemerintah menanggulangi kemiskinan, dengan menghitung kebutuhan dasar, seperti: sandang, pangan, dan papan, sekaligus sebagai jaring pengaman sosial dengan menghitung kebutuhan pendidikan dasar dan jasa transportasi.

Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan upah minimum di suatu daerah akan berdampak terhadap peningkatan upah rata-rata buruh di daerah tersebut. Kebijakan penetapan upah minimum oleh pemerintah bertujuan agar pekerja atau buruh tidak dieksploitasi serta mendapatkan upah yang cukup untuk hidup.

**Tabel 1.2 Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2011 – 2018 (dalam rupiah)**

Kabupaten/ Kota	Upah Minimum							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jembrana	927.500	1.000.000	1.212.500	1.542.600	1.662.500	1.834.558	2.006.617	2.181.393
Tabanan	910.000	1.005.000	1.250.000	1.542.600	1.706.700	1.902.970	2.059.965	2.239.500
Badung	1.221.000	1.290.000	1.401.000	1.728.000	1.905.000	2.124.075	2.299.311	2.499.581
Gianyar	1.003.625	1.104.000	1.230.000	1.543.000	1.707.750	1.904.141	2.061.233	2.240.766
Klungkung	927.000	995.000	1.190.000	1.545.000	1.650.000	1.839.750	1.991.529	2.164.992
Bangli	893.000	970.000	1.182.000	1.542.600	1.622.000	1.808.530	1.957.734	2.128.253
Karangasem	953.750	1.039.600	1.195.000	1.542.600	1.700.000	1.895.500	2.051.879	2.180.000
Buleleng	895.000	975.000	1.200.000	1.542.600	1.650.000	1.839.750	1.991.529	2.165.000
Denpasar	1.191.500	1.259.000	1.358.000	1.656.900	1.800.000	2.007.000	2.173.000	2.363.000
<b>Provinsi Bali</b>	<b>890.000</b>	<b>967.500</b>	<b>1.181.000</b>	<b>1.542.600</b>	<b>1.621.172</b>	<b>1.807.600</b>	<b>1.956.727</b>	<b>2.127.157</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2019.

Berdasarkan pada Tabel 1.2 perkembangan tingkat besaran upah minimum di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Dapat dilihat terjadi kenaikan upah minimum pada setiap tahunnya untuk setiap Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Dalam tabel tersebut dapat dilihat juga besaran upah minimum Kabupaten Badung dan Kota Denpasar adalah yang tertinggi dibanding wilayah lainnya di Provinsi Bali, dan upah minimum yang terendah yaitu pada Kabupaten Bangli.

Salah satu upaya dalam penanggulangan masalah kemiskinan yaitu upaya perluasan kesempatan kerja yang dilakukan untuk menciptakan lapangan kerja sehingga tingkat kemiskinan akan menurun. Kesempatan kerja secara umum dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang mencerminkan jumlah dari total angkatan kerja yang dapat diserap atau ikut serta aktif dalam kegiatan perekonomian. Kesempatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja atau yang disebut pekerja. Kesempatan kerja yang selama ini dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) baik melalui sensus penduduk maupun survei penduduk baik kesempatan kerja yang dirinci menurut lapangan usaha, jenis jabatan, maupun status hubungan kerja adalah menyangkut kesempatan kerja yang telah terisi.

**Tabel 1.3 Penduduk Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2011 - 2018 (dalam orang)**

Kabupaten/ Kota	Penduduk Yang Bekerja							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jembrana	146.869	152.066	135.611	142.086	142.434	152.549	162.665	161.024
Tabanan	244.038	261.379	262.044	262.006	264.113	255.433	246.754	271.836
Badung	302.822	319.930	325.012	322.913	338.816	341.022	343.229	357.451
Gianyar	258.004	266.747	262.409	265.787	283.779	292.074	300.370	306.437
Klungkung	92.772	96.527	99.416	100.803	104.130	104.051	103.972	106.035
Bangli	139.202	141.782	140.122	143.857	135.709	139.134	142.559	146.608
Karangasem	232.241	238.928	242.195	240.451	241.983	240.362	238.742	253.469
Buleleng	332.090	348.514	345.423	333.594	345.326	351.716	358.107	371.368
Denpasar	411.120	426.602	429.844	461.135	468.515	485.212	501.909	516.642
<b>Provinsi Bali</b>	<b>2.159.158</b>	<b>2.252.475</b>	<b>2.242.076</b>	<b>2.272.632</b>	<b>2.324.805</b>	<b>2.416.555</b>	<b>2.398.307</b>	<b>2.490.870</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2019.

Berdasarkan Tabel 1.3 menjelaskan bahwa, kondisi ketenagakerjaan yang ada di Provinsi Bali menurut Kabupaten/Kota mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2011 penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja pada Provinsi Bali sebesar 2.159.158 orang mengalami peningkatan pada tahun 2012 sebesar 2.252.475 orang. Pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 2.242.076 orang, dan pada tahun 2014 sampai 2016 kembali mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 kembali mengalami penurunan sebesar 2.398.307 orang dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 2.490.870 orang.

Kemiskinan tidak hanya di alami oleh negara yang berkembang, namun juga bagi negara maju yang telah memiliki kekayaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang memadai. Pada tingkat nasional ataupun regional, kemiskinan menjadi masalah yang kompleks dan juga kronis, sehingga diperlukan strategi yang tepat dan berkelanjutan untuk menanggulangnya.

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang masih menghadapi kemiskinan. Salah satu Provinsi yang tidak luput dari masalah kemiskinan yaitu Provinsi Bali, meskipun Provinsi Bali mempunyai struktur perekonomian yang sangat unik dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di

Indonesia, karena sebagian besar sumber penghidupan masyarakatnya bersumber dari sektor tersier (pariwisata) sedangkan sektor lainnya hanya berperan sebagai sektor pendukung (BPS, 2003). Fenomena kemiskinan telah berlangsung sejak lama walaupun telah dilakukan upaya penanggulangan sampai saat ini, namun nyatanya sektor pariwisata di Provinsi Bali yang terus berkembang, tidak membuat masalah kemiskinan mudah diatasi dan masih banyak penduduk yang masih terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Kemiskinan yang dimaksud merupakan ketidakmampuan untuk mengerahkan tabungan yang cukup, kurangnya keahlian masyarakat yang relatif masih rendah, dan kurangnya faktor pendorong untuk kegiatan penanaman modal. Tabel 1.4 berikut ini menunjukkan jumlah penduduk miskin per kabupaten/kota di Provinsi Bali pada tahun 2011 – 2018.

**Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2011 - 2018 (dalam ribu jiwa)**

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jembrana	17.60	15.30	14.92	15.80	15.83	14.53	14.78	14.35
Tabanan	24.20	21.00	22.49	24.40	24.05	21.90	21.66	19.77
Badung	14.60	12.51	14.55	15.40	14.40	12.91	13.16	12.97
Gianyar	26.00	22.63	20.80	22.50	22.89	22.13	22.42	21.26
Klungkung	10.70	9.30	12.21	12.30	12.11	11.21	11.15	10.43
Bangli	11.40	9.90	12.00	13.00	12.74	11.66	11.76	11.05
Karangasem	26.10	22.68	27.85	29.70	30.33	27.12	27.02	26.02
Buleleng	37.90	32.96	40.32	43.70	43.43	37.55	37.48	35.20
Denpasar	14.50	12.66	17.63	19.20	20.94	19.17	20.70	20.72
<b>Provinsi Bali</b>	<b>183.10</b>	<b>158.95</b>	<b>182.77</b>	<b>196.00</b>	<b>196.71</b>	<b>178.18</b>	<b>180.13</b>	<b>171.76</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2019.

Seperti terlihat pada Tabel 1.4 Provinsi Bali berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin semula pada tahun 2011 sebesar 183.10 ribu jiwa menjadi 171.76 ribu jiwa pada tahun 2018, meskipun mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Kabupaten Buleleng menjadi Kabupaten dengan jumlah penduduk miskin

tertinggi di Provinsi Bali pada setiap tahunnya, lalu diikuti dengan Kabupaten Karangasem dengan jumlah penduduk miskin tertinggi kedua setelah Kabupaten Buleleng. Tabel 1.5 berikut ini menunjukkan persentase penduduk miskin per kabupaten/kota di Provinsi Bali pada tahun 2011 - 2018

**Tabel 1.5 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2011 - 2018 (dalam persen)**

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jembrana	6,56	5,74	5,56	5,83	5,84	5,33	5,38	5,20
Tabanan	5,62	4,90	5,21	5,61	5,52	5,00	4,92	4,46
Badung	2,62	2,16	2,46	2,54	2,33	2,06	2,06	1,98
Gianyar	5,40	4,69	4,27	4,57	4,61	4,44	4,46	4,19
Klungkung	6,10	5,37	7,01	7,01	6,91	6,35	6,29	5,86
Bangli	5,16	4,52	5,45	5,86	5,73	5,22	5,23	4,89
Karangasem	6,43	5,63	6,88	7,30	7,44	6,61	6,55	6,28
Buleleng	5,93	5,19	6,31	6,79	6,74	5,79	5,74	5,36
Denpasar	1,79	1,52	2,07	2,21	2,39	2,15	2,27	2,24
<b>Provinsi Bali</b>	<b>4,59</b>	<b>3,95</b>	<b>4,49</b>	<b>4,76</b>	<b>4,74</b>	<b>4,25</b>	<b>4,25</b>	<b>4,01</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2019.*

Berdasarkan Tabel 1.5 menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Data tersebut juga menunjukkan bahwa Kabupaten Jembrana, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Buleleng merupakan Kabupaten-kabupaten yang mendominasi persentase penduduk miskin yang tinggi diantara Kabupaten lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Buleleng menjadi dua Kabupaten yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi baik dari segi jumlah maupun persentase penduduk miskin.

Provinsi Bali berhasil menurunkan persentase penduduk miskin semula pada tahun 2011 sebesar 4,59 persen menjadi 4,01 persen pada tahun 2018, walau demikian besarnya persentase penduduk miskin per Kabupaten/Kota maupun

Provinsi Bali tersebut masih menunjukkan perlunya perhatian serius dari pemerintah untuk mengentaskan masalah kemiskinan, sehingga dibutuhkan upaya lebih keras serta inovasi dari pemerintah Kabupaten/Kota maupun pemerintah Provinsi Bali dalam melaksanakan program-program pengentasan kemiskinan. Suatu Negara akan tetap miskin dan menjalani banyak kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi.

Berdasarkan kondisi kemiskinan yang dipandang sebagai bentuk permasalahan multidimensional, kemiskinan memiliki empat bentuk. Adapun keempat bentuk kemiskinan tersebut yaitu:

1) Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di mana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Garis kemiskinan diartikan sebagai pengeluaran rata-rata atau konsumsi rata-rata untuk kebutuhan pokok berkaitan dengan pemenuhan standar kesejahteraan.

2) Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. Daerah-daerah yang

belum terjangkau oleh program-program pembangunan seperti ini umumnya dikenal dengan istilah daerah tertinggal.

3) Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara modern. Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas, pemboros atau tidak pernah hemat, kurang kreatif, dan relatif pula bergantung pada pihak lain.

4) Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan seperti ini juga terkadang memiliki unsur diskriminatif.

Faktor–faktor penyebab kemiskinan menurut Kuncoro (2010) mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi menjadi tiga, yaitu.

- 1) Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang.
- 2) Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia (SDM), kualitas SDM yang rendah berarti produktifitasnya rendah yang

menyebabkan upah menjadi rendah. Hal ini muncul akibat rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan.

3) Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Kemiskinan dapat pula disebabkan oleh faktor sosial, yaitu faktor-faktor yang menghambat seseorang untuk memanfaatkan peluang-peluang yang tersedia. Faktor-faktor penghambat tersebut dibagi menjadi dua, yaitu:

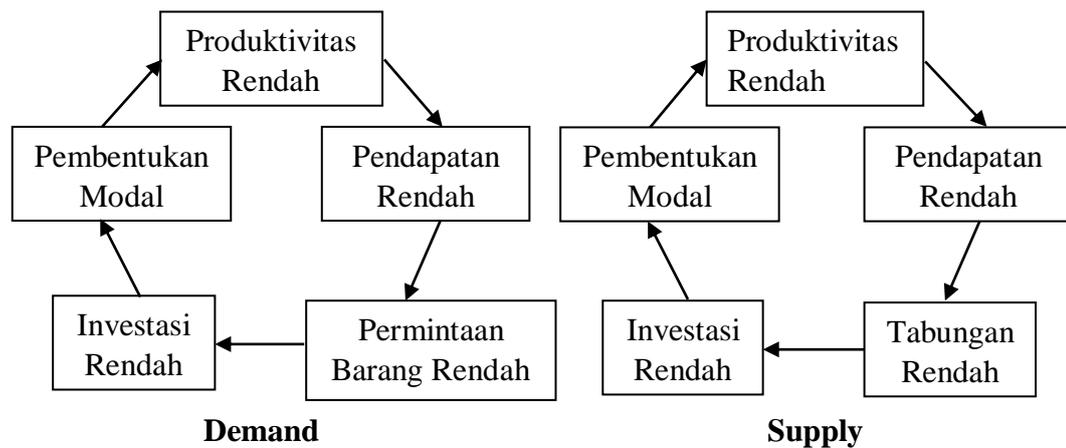
- (1) Faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Dapat berupa rendahnya tingkat pendidikan atau karena terhambatnya budaya, kemiskinan dapat muncul sebagai akibat nilai-nilai kebudayaan yang dianut oleh sekelompok orang itu sendiri.
- (2) Faktor-faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Birokrasi atau peraturan-peraturan resmi yang dapat mencegah seseorang untuk memanfaatkan kesempatan yang ada, kemiskinan seperti ini disebut juga dengan kemiskinan struktural.

Konsep lingkaran setan kemiskinan menganggap bahwa ketidakmampuan untuk mengarahkan tabungan yang cukup, kurangnya keahlian masyarakat yang relatif masih rendah, dan kurangnya faktor pendorong untuk kegiatan penanaman modal adalah tiga faktor yang menghambat proses pembentukan modal pembangunan ekonomi di Negara berkembang (Amalia, 2012).

Penyebab kemiskinan bermuara pada konsep lingkaran setan kemiskinan (*Vicious circle of poverty*) dari Nurkse 1953. Ragnar Nurkse (dalam Mudrajat Kuncoro, 2006) mengungkapkan bahwa adanya keterbelakangan,

ketidaksempurnaan pasar dan kurangnya modal menjadi penyebab produktivitas rendah sehingga pendapatan yang diterima juga rendah. Rendahnya pendapatan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya tabungan dan investasi ini menyebabkan keterblakangan.

**Gambar 2.1 Lingkaran Setan Kemiskinan Versi Nurkse**



Sumber: Mudrajad Kuncoro (2006)

Pada Gambar 2.1 Nurkse menjelaskan dua lingkaran perangkap kemiskinan dari segi penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Segi penawaran menjelaskan bahwa tingkat pendapatan masyarakat rendah akibat tingkat produktivitas rendah menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung rendah. Rendahnya kemampuan menabung masyarakat menyebabkan tingkat pembentukan modal (investasi) yang rendah, sehingga terjadi kekurangan modal dan dengan demikian tingkat produktivitas juga akan rendah dan begitu seterusnya.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan dan upah terhadap kesempatan kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan, upah, dan kesempatan kerja

terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh tidak langsung tingkat pendidikan dan upah terhadap kemiskinan melalui kesempatan kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali yaitu, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng dan Kota Denpasar. Dengan mengumpulkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali dan dari instansi lain yang terkait dengan penelitian ini. Obyek dari penelitian ini adalah kesempatan kerja dan kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

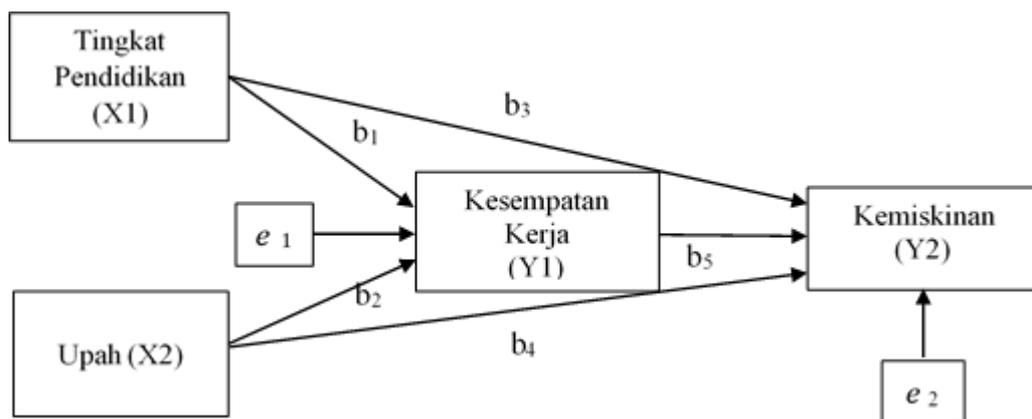
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2012). Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel tingkat pendidikan ( $X_1$ ) dan upah ( $X_2$ ) terhadap kesempatan kerja ( $Y_1$ ) dan kemiskinan ( $Y_2$ ) di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data Sekunder, yaitu data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen atau data dokumentasi Sugiyono (2017:10). Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data

tingkat pendidikan, data upah, data kesempatan kerja dan data kemiskinan masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi non partisipan. Teknik pengumpulan data dengan observasi atau pengamatan non partisipan dilakukan dengan cara peneliti tidak terlihat langsung dan hanya sebagai pengamat independen (Sugiyono, 2012).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis path, Analisis jalur (*path analysis*) merupakan pengembangan dari analisis regresi, sehingga analisis regresi dapat dikatakan sebagai bentuk khusus dari analisis. Analisis jalur digunakan untuk melukiskan dan menguji model hubungan antar variabel yang berbentuk sebab akibat. Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan variabel independent dan hubungan yang tidak langsung melalui variabel intervening.



**Gambar 3.1 Model analisis jalur pengaruh tingkat pendidikan dan upah terhadap kemiskinan melalui kesempatan kerja di Kabupaten/ Kota Provinsi Bali.**

Berdasarkan Gambar 3.1 dapat dibuat persamaan struktural sebagai berikut:

Struktur I

$$Y_1 = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e_1 \dots\dots\dots (1)$$

Struktur II

$$Y_2 = \beta_3 X_1 + \beta_4 X_2 + \beta_5 Y_1 + e_2 \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan:

- $Y_1$  = Kesempatan Kerja
- $Y_2$  = Kemiskinan
- $X_1$  = Tingkat Pendidikan
- $X_2$  = Upah
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$  = Koefisien regresi untuk masing – masing variabel X
- $e_1, e_2$  = Error

Statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel-variabel penelitian, seperti nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), standar deviasi (standard deviation). Statistik deskriptif dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 4.6 sebagai berikut.

**Tabel 4.6 Hasil Statistik Deskriptif Tingkat Pendidikan, Upah, Kesempatan Kerja dan Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tingkat Pendidikan	72	.66	1.05	.8873	.08932
Upah	72	5.95	6.40	6.1847	.13762
Kesempatan kerja	72	4.97	5.71	5.3579	.20806
Kemiskinan	72	.18	.87	.6637	.17803
Valid N (listwise)	72				

Sumber: *Data diolah, lampiran 2.*

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat dijelaskan bahwa banyaknya data yang digunakan sejumlah 72 pengamatan. Tingkat pendidikan memiliki nilai minimum sebesar 0,66 dan rata-ratanya sebesar 0,88 yang mendekati nilai maksimum

sebesar 1,05. Nilai standar deviasi sebesar 0,09 yang berarti bahwa terjadi penyimpangan terhadap tingkat pendidikan sebesar 0,09. Hal ini berarti bahwa setiap kesempatan kerja naik 1% maka tingkat pendidikan akan meningkat sebesar 0,88%.

Upah memiliki nilai minimum sebesar 5,95 dan rata-ratanya sebesar 6,18 mendekati nilai maksimumnya sebesar 6,40. Nilai standar deviasi sebesar 0,14 yang berarti bahwa terjadi penyimpangan terhadap upah sebesar 0,14. Hal ini berarti bahwa setiap kesempatan kerja naik 1% maka upah akan meningkat sebesar 6,18%.

Kesempatan kerja memiliki nilai minimum sebesar 4,97 dan rata-ratanya sebesar 5,36 yang mendekati nilai maksimumnya sebesar 5,71. Nilai standar deviasi sebesar 0,21 yang berarti bahwa terjadi penyimpangan terhadap upah sebesar 0,21. Hal ini berarti bahwa setiap kemiskinan menurun 1% maka kesempatan kerja meningkat sebesar 5,36%.

Kemiskinan memiliki nilai minimum sebesar 0,18 dan rata-ratanya sebesar 0,67 yang mendekati nilai maksimumnya sebesar 0,87. Nilai standar deviasinya sebesar 0,18 yang berarti bahwa terjadi penyimpangan kemiskinan sebesar 0,18.

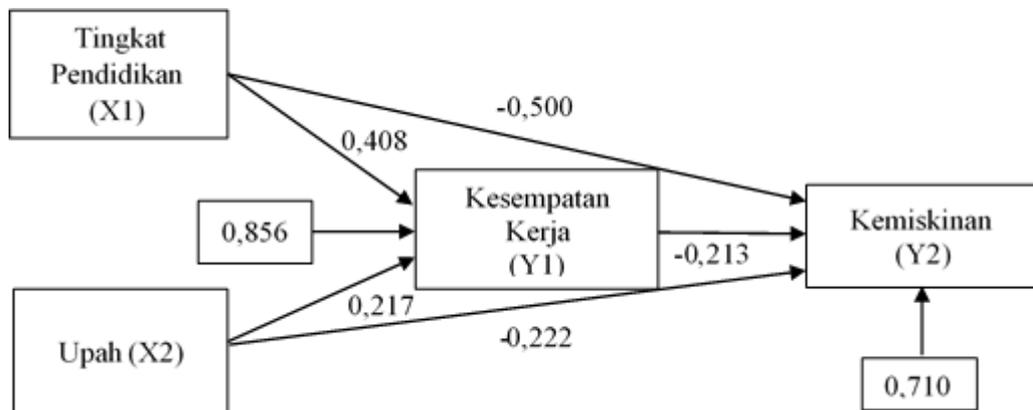
#### **Nilai Kekeliruan Taksiran Standar**

Untuk mengetahui nilai  $e_1$  yang menunjukkan jumlah variance variabel kesempatan kerja yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel tingkat pendidikan dan upah dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned}
 e_1 &= \sqrt{1 - R_1^2} \\
 &= \sqrt{1 - 0,267} \\
 &= \sqrt{0,733} \\
 &= 0,856
 \end{aligned}$$

Untuk mengetahui nilai  $e_2$  yang menunjukkan variance variabel kemiskinan yang tidak dijelaskan oleh variabel tingkat pendidikan, upah, dan kesempatan kerja, maka dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\begin{aligned}
 e_2 &= \sqrt{1 - R_2^2} \\
 &= \sqrt{1 - 0,496} \\
 &= \sqrt{0,504} \\
 &= 0,710
 \end{aligned}$$



**Gambar 4.1 Koefisien Jalur Hubungan Antar Variabel Penelitian**

### Pemeriksaan Validitas Model

Untuk memeriksa validitas model, terdapat indikator untuk melakukan pemeriksaan yaitu koefisien determinasi total hasilnya sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 R^2m &= 1 - e_1^2 e_2^2 \\
 &= 1 - (0,856^2) (0,710^2) \\
 &= 1 - (0,732) (0,504) \\
 &= 1 - 0,369 \\
 &= 0,631
 \end{aligned}$$

Keterangan :

$R^2m$  : Koefisien determinasi total

$e_1, e_2$  : Nilai kekeliruan standar

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi total, maka diperoleh bahwa keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model sebesar 0,631 atau sebesar 63,1% atau dengan kata lain informasi yang terkandung dalam data sebesar 63,1% sedangkan sisanya yaitu 36,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1) Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Upah Terhadap Kesempatan Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Bali

#### (1) Persamaan regresi substruktural I

Berdasarkan persamaan substruktural I dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh langsung variabel tingkat pendidikan dan upah terhadap kesempatan kerja di kabupaten/kota di Provinsi Bali. Adapun persamaan regresi ditunjukkan sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 Y_1 &= 0,408 X_1 + 0,271 X_2 + e_1 \\
 Sb &= (0,408) \quad (0,271) \quad R^2 = 0,267 \\
 t &= (3,932) \quad (2,612) \quad F = 12,562 \\
 sig &= (0,000) \quad (0,011)
 \end{aligned}$$

(2) Pengujian signifikansi persamaan regresi substruktural I

**Tabel 4.7 Ringkasan Koefisien Jalur Substruktural I**

Regresi	Koef. Reg. Standar	T hitung	P. Value/sig	Keterangan
X <sub>1</sub> → Y <sub>1</sub>	0,408	3,932	0,000	Positif
X <sub>2</sub> → Y <sub>1</sub>	0,271	2,612	0,011	Positif

Sumber : Data diolah, Lampiran 3.

Berdasarkan persamaan regresi substruktural I, F<sub>tabel</sub> menunjukkan angka sebesar 12,562 dengan signifikansi sebesar 0,000. F<sub>tabel</sub> 12,562 > 0,000 artinya bahwa model regresi yang diestimasi dari variabel tingkat pendidikan, upah, dan kesempatan kerja sudah layak (fit).

**2) Pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah dan Kesempatan Kerja terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali**

(1) Persamaan regresi substruktural II

Berdasarkan persamaan substruktural II dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh langsung variabel tingkat pendidikan, upah dan kesempatan kerja terhadap kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Bali. Adapun persamaan regresi ditunjukkan sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 Y_2 &= (-0,500) X_1 - (-0,222) X_2 - (-0,213) X_3 + e_2 \\
 Sb &= (-0,500) \quad (-0,222) \quad (-0,213) \quad R^2 = 0,496 \\
 t &= (-5,212) \quad (-2,437) \quad (2,117) \quad F = 22,276 \\
 sig &= (0,000) \quad (0,017) \quad (0,038)
 \end{aligned}$$

(2) Pengujian signifikansi persamaan regresi substruktural II

**Tabel 4.8 Ringkasan Koefisien Jalur Substruktural II**

Regresi	Koef. Reg. Standar	T hitung	P. Value/sig	Keterangan
X <sub>1</sub> → Y <sub>2</sub>	-0,500	-5,212	0,000	Negatif
X <sub>2</sub> → Y <sub>2</sub>	-0,222	-2,437	0,017	Negatif
Y <sub>1</sub> → Y <sub>2</sub>	-0,213	-2,117	0,038	Negatif

Sumber: Data diolah, Lampiran 4.

Berdasarkan persamaan regresi substruktural II,  $F_{\text{tabel}}$  menunjukkan angka sebesar 22,276 dengan signifikansi sebesar 0,000.  $F_{\text{tabel}} 22,276 > 0,000$ , artinya bahwa model regresi yang diestimasi dari variabel tingkat pendidikan, upah, kesempatan kerja dan kemiskinan sudah layak (*fit*).

Berdasarkan hasil analisis data, maka diperoleh koefisien jalur hubungan antar variabel sebagai berikut.

**Tabel 4.9 Ringkasan Jalur dan Signifikansi Hubungan Antar Variabel**

Regresi	Standardized Coefficients Beta	P. Value	Keterangan
$X_1 \rightarrow Y_1$	0,408	0,000	Signifikan
$X_2 \rightarrow Y_1$	0,271	0,011	Signifikan
$X_1 \rightarrow Y_2$	-0,500	0,000	Signifikan
$X_2 \rightarrow Y_2$	-0,222	0,017	Signifikan
$Y_1 \rightarrow Y_2$	-0,213	0,038	Signifikan

Sumber: Data diolah, Lampiran 2 dan 3.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis penelitian pengaruh langsung tingkat pendidikan terhadap kesempatan kerja berdasarkan hasil regresi yang diperoleh dengan bantuan program SPSS diperoleh  $t_{\text{hitung}}$  untuk variabel tingkat pendidikan ( $X_1$ ) sebesar 3,932 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Oleh karena  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}} 3,932 > 1,667$  dan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Hal ini berarti bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Pengaruh langsung upah terhadap kesempatan kerja berdasarkan hasil regresi yang diperoleh dengan bantuan program SPSS diperoleh  $t_{\text{hitung}}$  untuk variabel upah ( $X_2$ ) sebesar 2,612 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,011. Oleh karena  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}} 2,612 > 1,667$  dan nilai signifikansi sebesar  $0,011 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Hal ini berarti bahwa upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Pengaruh langsung tingkat pendidikan terhadap kemiskinan berdasarkan hasil regresi yang diperoleh dengan bantuan program SPSS diperoleh  $t_{hitung}$  untuk variabel tingkat pendidikan ( $X_1$ ) sebesar -5,212 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Oleh karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$   $-5,212 > -1,667$  dan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Hal ini berarti bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Pengaruh langsung upah terhadap kemiskinan berdasarkan hasil regresi yang diperoleh dengan bantuan program SPSS diperoleh  $t_{hitung}$  untuk variabel upah ( $X_2$ ) sebesar -2,437 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,017. Oleh karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$   $-2,437 > -1,667$  dan nilai signifikansi sebesar  $0,017 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Hal ini berarti bahwa upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Pengaruh langsung kesempatan kerja terhadap kemiskinan berdasarkan hasil regresi yang diperoleh dengan bantuan program SPSS diperoleh  $t_{hitung}$  untuk variabel kesempatan kerja ( $Y_1$ ) sebesar 2,117 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,038. Oleh karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$   $-2,117 > -1,667$  dan nilai signifikansi sebesar  $0,038 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Hal ini berarti bahwa upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Pengaruh tidak langsung tingkat pendidikan terhadap kemiskinan melalui kesempatan kerja oleh karena  $z_{hitung} < z_{tabel}$  yaitu  $1,706 < 1,96$  artinya  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak sehingga kesempatan kerja bukan sebagai variabel

intervening tingkat pendidikan ( $X_1$ ) terhadap kemiskinan ( $Y_2$ ) di Kabupaten/Kota Provinsi Bali atau dengan kata lain tingkat pendidikan tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemiskinan melalui kesempatan kerja.

Pengaruh tidak langsung upah terhadap kemiskinan melalui kesempatan kerja oleh karena  $z$  hitung  $< z$  tabel yaitu  $1,758 < 1,96$  artinya  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak sehingga kesempatan kerja bukan sebagai variabel intervening upah ( $X_2$ ) terhadap kemiskinan ( $Y_2$ ) di Provinsi Bali atau dengan kata lain upah tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemiskinan melalui kesempatan kerja.

## **SIMPULAN**

Tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Tingkat Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Kesempatan kerja bukan sebagai variabel intervening tingkat pendidikan ( $X_1$ ) terhadap kemiskinan ( $Y_2$ ) di Kabupaten/Kota Provinsi Bali atau dengan kata lain tingkat pendidikan tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemiskinan melalui kesempatan kerja. Kesempatan kerja bukan sebagai variabel intervening upah ( $X_2$ ) terhadap kemiskinan ( $Y_2$ ) di Provinsi Bali atau dengan kata lain upah tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemiskinan melalui kesempatan kerja.

## REFERENSI

- Amalia, Fitri. 2012. Pengaruh Pendidikan, Pengangguran Dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Vol 10, No.2.
- Aristina, Ita, Made Kembar Sri Budhi, I G.A.P. Wirathi, Ida Bagus Darsana. 2017. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. Vol.6, No. 5. pp. 677-704.
- Arsyad, Lincolin. 1997. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2018. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Provinsi Bali 2010-2018. Katalog BPS Provinsi Bali.
- \_\_\_\_\_. 2018. Upah Minimum Kabupaten/Kota Provinsi Bali 2010-2018. Katalog BPS Provinsi Bali.
- \_\_\_\_\_. 2018. Penduduk Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Bali 2010-2018. Katalog BPS Provinsi Bali.
- \_\_\_\_\_. 2018. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Bali 2010-2018. Katalog BPS Provinsi Bali.
- \_\_\_\_\_. 2018. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Bali 2010-2018. Katalog BPS Provinsi Bali.
- Budhi, Made Kembar Sri. 2013. Analisis Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Bali: Analisis FEM Data Panel. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Vol.6, No.1.
- Finkayana, I Putu Arya dan Made Heny Urmila Dewi. 2016. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Indikator Komposit IPM Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Bali Tahun 2004–2013. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*. Vol.5, No.7, Pp 861-881.
- Ihsan, Khairil dan Ikhsan. 2018. Analisis Pengaruh UMP, Inflasi, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Vol 3, No.3, 408-419.
- Kaufman, Bruce E, Julie L. Hotchkiss. 2013. *The Economics Of Labor Markets*. Canada. Thomson South-Western.

- Kuncoro, Mudrajad. 2006. *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mankiw N, Gregory. 2006. *Makro Ekonomi*, Terjemahan: Fitria Liza, Imam Nurmawan, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Meylina Astri, Sri Indah Nikensari, dan Harya Kuncara. 2013. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis*. Vol 1, No.1. 77-102.
- Putra, I Putu Danendra Dan I Gede Wardana. 2018. Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Konsumsi Beras Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*. Vol.7 No.6 : 1589-1616.
- Putra, I Kadek Yoga Darma dan Dr. IG. W. Murjana Yasa. 2018. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan UMR Terhadap Tingkat Pengangguran Dan Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. Vol.7, No.11, 2461-2489.
- Putra, I Komang Agus Adi dan Sudarsana Arka. 2018. Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Kesempatan Kerja, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*. Vol. 7, No. 3, pp. 416-444.
- Purnami, Ni Made Sasih dan Ida Ayu Nyoman Saskara. 2016. Analisis Pengaruh Pendidikan Dan Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Jumlah Penduduk Miskin. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. Vol.5, No.11. 1188-1218.
- Putri, I.A. Mega Septyana dan Ni Nyoman Yuliarmi. 2013. Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. Vol.2 No.10, pp. 441-448.
- Prasetyo, Adit Agus. 2010. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan. *Skripsi*.
- Rahmawati, Ikka Dewi. 2014. Pengaruh Investasi Dan Tingkat Upah Terhadap Kesempatan Kerja Di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Perencanaan Pembangunan*. Vol.1 No. 4.

- Simanjuntak, Payaman. 2001. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta : FE UI.
- Sudiana, I Wayan dan I Ketut Sudiana. 2015. Pengaruh PDRB, Pendidikan Dan Struktur Tenaga Kerja Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. Vol 4, No.6, Pp 608-620.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penulisan Pendidikan* (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung : Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Metode Penulisan Pendidikan* (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung : Alfabeta.
- Sulistiawati, Rini. 2012. Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Sosial*. Vol 8, No.3.
- Suyana Utama, Made. 2012. Buku Ajar Aplikasi Analisis Kuantitatif. Denpasar: Sastra Utama.
- Todaro, Smith. 2005. Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga. Edisi Kedelapan. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Todaro, P.Michael. 2006. Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan.
- Wenagama, I Wayan. 2013. Peranan Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Dan Tingkat Pendapatan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*. Vol. 18, No. 1: 1410-4628.
- Wiguna, Van Indra. 2013. Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah 2005-2010. Universitas Brawijaya.
- World Bank. 2010. Making the New Indonesia Work for the Poor. Jakarta: Indopov.

Yudha, Okta Ryan Pranata. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Dan Inflasi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2009-2011. *Skripsi*.